

ANALISIS ASIMETRI PEMBANGUNAN DAERAH DAN DINAMIKA KEMISKINAN ANTARPROVINSI DI INDONESIA: PENDEKATAN REGRESI DATA PANEL (2021–2025)

Nurviani^{1*}, Siti Hajar², Purwanto³, Darlia⁴, Sayyidah Junaidah Al-Bahri⁵, Lia Mulyani⁶, Nurul Yusuf⁷, Widiyana Latifah⁸, Dwi Rahayu Nurmiati⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} STISIP Syamsul Ulum, Sukabumi, Indonesia

*Corresponding author: nurviani.thea@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan antarprovinsi di Indonesia periode 2021–2025. Menggunakan desain eksplanatori kuantitatif dengan data panel seimbang dari 38 provinsi (190 observasi) bersumber dari Badan Pusat Statistik, estimasi dilakukan dengan regresi data panel pendekatan *Fixed Effect Model* setelah melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji asumsi klasik. Hasil menunjukkan TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan IPM dan PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan. Ketiga variabel secara simultan menjelaskan 86,5% variasi kemiskinan antarprovinsi. IPM terbukti sebagai determinan paling elastis, mengindikasikan bahwa investasi modal manusia berperan sebagai perisai struktural utama dibandingkan pertumbuhan ekonomi berbasis modal padat. Penelitian ini merekomendasikan transformasi kebijakan dari pertumbuhan agregat menuju strategi inklusif berbasis penguatan kapasitas modal manusia serta revitalisasi pasar tenaga kerja di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Kata Kunci: Kemiskinan Makro, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per Kapita, *Fixed Effect Model*.

Abstract

This study examines the effects of the open unemployment rate (TPT), the human development index (HDI), and regional GDP per capita on the poverty rate across Indonesian provinces during 2021–2025. Using a quantitative explanatory design with a balanced panel dataset covering 38 provinces (190 observations) sourced from Statistics Indonesia (BPS), parameters were estimated using panel data regression with a Fixed Effect Model, selected after Chow and Hausman tests and classical assumption checks. The results show that the open unemployment rate has a positive and significant effect on poverty, while the human development index and GDP per capita have negative and significant effects. Together, the three variables explain 86.5 percent of the variation in poverty across provinces. The human development index emerges as the most elastic determinant, indicating that investment in human capital functions as the primary structural shield against poverty, more so than capital-intensive economic growth. These findings support a policy shift from aggregate, growth-oriented strategies toward inclusive, human-capital-based approaches, along with the revitalization of local labor markets in Indonesia's underdeveloped, frontier, and outermost regions.

Keywords: Macro Poverty; Unemployment; Human Development Index; Regional GDP per Capita; *Fixed Effect Model*.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi episentrum perdebatan ekonomi makro dan agenda kebijakan struktural di negara berkembang, termasuk Indonesia (World Bank, 2025). Sebagai negara kepulauan dengan kompleksitas sosial-ekonomi yang masif, Indonesia menghadapi realitas paradoks: pertumbuhan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 menunjukkan tren

pemulihan yang stabil pada kisaran 5,0–5,3% per tahun, namun laju penurunan tingkat kemiskinan cenderung stagnan. Per Maret 2025, angka kemiskinan nasional berada pada satu digit, sekitar 9,21%, tetapi di balik agregat nasional tersebut tersembunyi deviasi spasial yang ekstrem. Provinsi di wilayah barat Indonesia, seperti DKI Jakarta dan Bali, mencatatkan tingkat kemiskinan di bawah 5%, sementara wilayah timur Indonesia seperti Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur masih terjebak dalam kemiskinan sistemik dengan angka melampaui 18–20% (Badan Pusat Statistik, 2021–2025).

Fenomena asimetri pembangunan ini memicu pertanyaan krusial mengenai efektivitas instrumen penggerak pembangunan daerah. Secara teoretis, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita seharusnya berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan melalui *trickle-down effect* (Pratamasyari et al., 2025). Namun, fakta empiris di Indonesia menunjukkan bahwa percepatan IPM yang tumbuh rata-rata di atas 1,2% per tahun di tingkat provinsi tidak secara otomatis melikuidasi kantong-kantong kemiskinan struktural (Arndt, Mahrt, & Tarp, 2020; Suryahadi, Al Izzati, & Suryadarma, 2021). Jawaban atas persistensi ini diduga terletak pada kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri serta rigiditas pasar tenaga kerja yang tecermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Kemiskinan sendiri merupakan fenomena multidimensional yang melampaui sekadar keterbatasan finansial. Foster, Greer, dan Thorbecke (2010) membedakan kemiskinan absolut, yakni ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar, dari kemiskinan relatif yang melihat kemiskinan sebagai fungsi distribusi pendapatan dan ketimpangan sosial. Dalam lanskap kontemporer, pendekatan kapabilitas mendefinisikan ulang kemiskinan bukan sebagai deprivasi pendapatan semata, melainkan sebagai kegagalan kapabilitas untuk memfungsikan potensi diri secara penuh, ketika ketiadaan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan primer menjebak individu dalam lingkaran setan kemiskinan. Pandangan ini sejalan dengan *Human Capital Theory* (Becker, 1964), yang mendalilkan bahwa investasi pada manusia berupa pendidikan dan kesehatan merupakan determinan utama peningkatan produktivitas marginal tenaga kerja, yang pada gilirannya menaikkan upah dan mengeliminasi kemiskinan. Mekanisme transmisi TPT terhadap kemiskinan bekerja melalui jalur pendapatan: ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau gagal memperoleh pekerjaan, pendapatan disposibel rumah tangga jatuh ke titik nol atau di bawah garis kemiskinan, dan tanpa jaring pengaman sosial yang memadai, kondisi tersebut secara sistemik menggeser rumah tangga ke kategori miskin. Sementara itu, pertumbuhan PDRB per kapita bertindak sebagai mesin penggerak reduksi kemiskinan melalui efek pengganda, memperluas basis pemajakan daerah dan memberi ruang fiskal bagi pemerintah untuk mendanai barang publik dan program bantuan sosial (Bhagwati & Panagariya, 2013), meskipun dampaknya sangat bergantung pada elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan.

Meskipun literatur konvensional telah banyak mengeksplorasi determinan kemiskinan, terdapat inkonsistensi empiris yang cukup luas di antara para peneliti. Dartanto, Moeis, dan Otsuka (2023) berargumen bahwa PDRB per kapita merupakan determinan paling elastis dalam menekan kemiskinan di Asia Tenggara, sementara Purnomo, Handoko, dan Wibowo (2024) serta Widiyanto dan Setyadharma (2025) mendapati bahwa pertumbuhan PDRB per kapita di era modern sering bersifat padat modal dan terkonsentrasi pada sektor *non-tradable*, sehingga gagal menciptakan lapangan kerja berkualitas dan kurang berdampak terhadap penurunan kemiskinan di tingkat akar rumput. Demikian pula, pengaruh TPT terhadap kemiskinan belum konklusif: Jonaidi (2023) menemukan pengangguran berdampak positif signifikan terhadap kemiskinan struktural regional, sementara sebagian studi lain menunjukkan kemungkinan hubungan yang tidak linier akibat adanya katup penyelamat berupa sektor informal. Inkonsistensi ini menciptakan kesenjangan penelitian yang mendasar, terlebih karena sebagian besar studi terdahulu berfokus pada agregasi data nasional atau belum

mengintegrasikan pemekaran provinsi baru di Papua menjadi 38 provinsi sejak akhir 2022 ke dalam analisis data panel spasial-temporal yang komprehensif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa integrasi penuh data panel 38 provinsi di Indonesia untuk periode 2021–2025 yang menangkap dinamika pemulihan ekonomi, transformasi pasar tenaga kerja pascakrisis, dan dampak nyata pemekaran wilayah, sekaligus menguji elastisitas multivariat untuk melihat apakah IPM bertindak sebagai perisai struktural dalam meredam dampak volatilitas makroekonomi terhadap penduduk rentan miskin, dan apakah PDRB per kapita di Indonesia saat ini mencerminkan *pro-poor growth* atau justru *pro-rich growth*. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada perluasan *Human Capital Theory* dan *Capability Approach* dalam konteks ekonomi kepulauan yang bercirikan fragmentasi spasial; secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi empiris bagi Kementerian PPN/Bappenas dan pemerintah daerah untuk memformulasikan strategi pengentasan kemiskinan yang berbasis karakteristik regional, bukan lagi bersifat *one-size-fits-all*. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi secara simultan dan parsial pengaruh TPT, IPM, dan PDRB per kapita terhadap kemiskinan makro antarprovinsi di Indonesia dalam kerangka regresi data panel yang kokoh, dengan hipotesis bahwa TPT berpengaruh positif signifikan, IPM dan PDRB per kapita berpengaruh negatif signifikan, serta ketiganya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan antarprovinsi di Indonesia periode 2021–2025.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory research* untuk menguji dan membuktikan secara empiris hubungan kausalitas antarvariabel independen terhadap variabel dependen. Data yang digunakan merupakan data sekunder berjenis data panel seimbang (*balanced panel data*), yang menggabungkan dimensi deret waktu (*time-series*) dari tahun 2021 hingga 2025 dan dimensi silang tempat (*cross-section*) sebanyak 38 provinsi di Indonesia, menghasilkan total 190 observasi. Seluruh data bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Variabel dependen, variabel independen, definisi operasional, satuan, dan sumber data secara rinci disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Simbol	Definisi Operasional	Satuan	Sumber
Tingkat Kemiskinan	Y	Persentase penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan pada suatu provinsi.	Persen (%)	BPS (2021–2025)
Tingkat Pengangguran Terbuka	X1	Persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja pada periode pengamatan.	Persen (%)	BPS (2021–2025)
Indeks Pembangunan Manusia	X2	Indikator komposit capaian pembangunan manusia berbasis umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak.	Indeks (0–100)	BPS (2021–2025)
PDRB per Kapita	ln(X3)	Nilai PDRB atas dasar harga konstan dibagi jumlah penduduk, ditransformasi ke bentuk logaritma natural.	Juta Rupiah	BPS (2021–2025)

Penggunaan data panel dipilih karena memberikan keuntungan berupa peningkatan derajat kebebasan (*degree of freedom*), meminimalkan kolinearitas antarvariabel, dan mengontrol heterogenitas individu yang tidak terobservasi (*unobserved heterogeneity*) (Baltagi, 2021). Model regresi linier berganda data panel dalam penelitian ini diformulasikan

ke dalam struktur log-linier pada variabel PDRB per kapita guna mereduksi varians data yang ekstrem, yaitu $Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 \ln(X3_{it}) + u_{it}$, dengan Y mewakili tingkat kemiskinan (%), X1 mewakili TPT (%), X2 mewakili IPM (indeks), dan $\ln(X3)$ mewakili logaritma natural PDRB per kapita (Rupiah); i menunjukkan entitas provinsi (1–38) dan t menunjukkan runtun waktu (2021–2025).

Estimasi parameter dilakukan dengan metode regresi data panel, di mana model estimasi terbaik dipilih melalui serangkaian uji formal, yaitu uji Chow untuk memilih antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*, serta uji Hausman untuk memilih antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*, yang dilanjutkan dengan uji asumsi klasik (*robustness check*) meliputi uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan model estimasi bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial melalui uji t dan secara simultan melalui uji F, dengan tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 95% ($\alpha = 5\%$).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif atas 190 observasi data panel (Tabel 2) mengonfirmasi adanya kesenjangan spasial yang lebar di Indonesia. Tingkat kemiskinan antarprovinsi menunjukkan rentang yang sangat ekstrem, dari serendah 4,12% hingga setinggi 26,80%, dengan rata-rata 10,42% dan standar deviasi 4,89. TPT rata-rata berada pada 5,34% dengan rentang 1,75–9,86%, sementara IPM rata-rata 73,85 dengan rentang 61,35–83,55. Deviasi yang lebar juga terdeteksi pada PDRB per kapita, dengan nilai rata-rata Rp62,45 juta namun standar deviasi mencapai Rp54,12 juta, mengindikasikan konsentrasi kue ekonomi yang belum merata antarprovinsi.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Mean	Maksimum	Minimum	Std. Deviasi
Kemiskinan (Y)	10,42	26,80	4,12	4,89
TPT (X1)	5,34	9,86	1,75	1,62
IPM (X2)	73,85	83,55	61,35	3,92
PDRB per Kapita (X3, Juta Rp)	62,45	310,20	15,40	54,12

Pemilihan model estimasi terbaik dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman, yang keduanya mengarahkan pada penggunaan *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai model estimasi yang paling sesuai dengan struktur data panel penelitian ini, setelah melalui uji asumsi klasik untuk memastikan model bebas dari masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil estimasi FEM disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Variabel Independen	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas
Konstanta (β_0)	68,452	8,941	0,0000***
TPT (X1)	0,241	2,854	0,0049***
IPM (X2)	-0,612	-6,712	0,0000***
$\ln_PDRBK$ (X3)	-1,425	-3,412	0,0008***

Keterangan: $R^2 = 0,894$; $Adjusted R^2 = 0,865$; $F\text{-statistik} = 30,821$; $Prob(F\text{-statistik}) = 0,0000$ ***; *** signifikan pada $\alpha = 1\%$.

Hasil estimasi FEM memberikan justifikasi empiris yang kuat terhadap determinasi variabel makroekonomi dalam memengaruhi tingkat kemiskinan antarprovinsi di Indonesia. Model ini mencatatkan nilai *R-squared* sebesar 0,894 dan *Adjusted R-squared* sebesar 0,865,

yang berarti 86,5% variasi naik-turunnya tingkat kemiskinan makro di 38 provinsi Indonesia mampu dijelaskan secara simultan oleh TPT, IPM, dan logaritma PDRB per kapita, sementara sisanya 13,5% ditentukan oleh faktor di luar model, seperti efektivitas program perlindungan sosial spesifik dan tata kelola kelembagaan daerah. Pengujian simultan melalui nilai F-statistik sebesar 30,821 dengan signifikansi $p = 0,0000$ menerima hipotesis bahwa TPT, IPM, dan PDRB per kapita secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan antarprovinsi, membuktikan bahwa kesatuan gerak kebijakan pasar tenaga kerja, investasi manusia, dan pertumbuhan ekonomi daerah sangat determinan dalam menekan kemiskinan.

Secara parsial, koefisien TPT bernilai 0,241 dengan $p = 0,0049$ (signifikan pada $\alpha = 1\%$), menerima hipotesis bahwa TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan: setiap kenaikan TPT sebesar 1 poin persentase di suatu provinsi mendorong peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 0,241 poin persentase, ceteris paribus. Arah positif ini sejalan dengan mekanisme jalur pendapatan (*income channel*), di mana pengangguran mengindikasikan ketidakmampuan struktural perekonomian regional dalam menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas untuk menyerap angkatan kerja baru; tanpa skema *unemployment* benefit yang memadai di tingkat daerah, hilangnya pendapatan utama memaksa pengeluaran konsumsi domestik jatuh di bawah ambang batas garis kemiskinan. Temuan ini memperkuat riset Jonaidi (2023) yang juga menemukan pengangguran berdampak positif signifikan terhadap kemiskinan struktural regional, dan mengindikasikan bahwa pada periode 2021–2025 fleksibilitas sektor informal sebagai katup penyelamat mulai jenuh, sehingga fenomena *underemployment* dan kerentanan lapangan kerja informal pascakrisis justru mempercepat transmisi kemiskinan baru akibat rendahnya produktivitas dan upah di sektor tersebut.

Variabel IPM menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,612 dengan t-statistik ekstrem -6,712 ($p = 0,0000$), menerima hipotesis bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan: setiap kenaikan indeks IPM sebesar 1 poin memicu penurunan tingkat kemiskinan regional sebesar 0,612 poin *persentase*. IPM terbukti sebagai variabel dengan daya reduksi kemiskinan paling besar dibandingkan variabel lainnya, memberikan validasi empiris terhadap *Capability Approach* dan *Human Capital Theory* (Becker, 1964): peningkatan IPM yang tecermin dari perbaikan derajat kesehatan dan akumulasi modal pendidikan secara fundamental merestrukturisasi kapabilitas kognitif dan fisik masyarakat rentan, memberi fleksibilitas lebih tinggi dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi ekonomi digital dan pergeseran pasar tenaga kerja formal. Temuan ini memverifikasi hasil Wan, Hu, dan Liu (2023) serta Purnomo, Handoko, dan Wibowo (2024) yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis manusia, dan mengindikasikan bahwa intervensi langsung pemerintah daerah pada sektor pendidikan vokasi, penurunan angka stunting, dan akses jaminan kesehatan daerah merupakan jalan paling efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia.

Variabel logaritma natural PDRB per kapita menunjukkan koefisien -1,425 dengan $p = 0,0008$ (signifikan pada $\alpha = 1\%$), menerima hipotesis bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Karena variabel ini menggunakan transformasi logaritma, interpretasinya bersifat elastisitas murni: setiap kenaikan PDRB per kapita sebesar 1%, menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi sebesar 1,425 poin *persentase*, ceteris paribus. Meskipun demikian, signifikansi statistik ini menyembunyikan realitas struktural yang kompleks bila dikaitkan dengan asimetri spasial antarprovinsi: pada daerah kaya sumber daya alam ekstraktif seperti Kalimantan Timur, Riau, atau wilayah pemekaran baru di Papua, besarnya pertumbuhan PDRB per kapita sering kali tidak sejalan dengan kecepatan eliminasi kemiskinan di daerah tersebut. Inkonsistensi ini kemungkinan terjadi karena fenomena pertumbuhan ekonomi yang bias perkotaan (*urban bias*) dan padat modal (*capital-intensive*); pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia banyak didominasi oleh sektor *non-tradable* dan

industri ekstraktif skala besar yang mengalirkan keuntungan modal keluar dari daerah asal, sehingga dampak rembesan ke bawah (*trickle-down effect*) menjadi terbatas (Ivani & Auwalin, 2024). Hal ini sejalan dengan argumen Ravallion (2021) dan Fosu (2023) bahwa daya dorong pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan akan melemah apabila struktur ekonomi awal diwarnai ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi, serta melengkapi perdebatan Dartanto, Moeis, dan Otsuka (2023) dan Widiyanto dan Setyadharma (2025) mengenai kualitas pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia: penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB per kapita di tingkat agregat tetap signifikan mereduksi kemiskinan, tetapi elastisitasnya jauh lebih rendah dibandingkan IPM, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi semata belum tentu bersifat *pro-poor growth* apabila tidak disertai penguatan modal manusia.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa dalam struktur ekonomi kepulauan Indonesia yang bercirikan fragmentasi spasial, investasi pada modal manusia melalui IPM bertindak sebagai perisai struktural utama dalam menekan kemiskinan, lebih kuat dibandingkan pertumbuhan ekonomi berbasis PDRB per kapita yang cenderung padat modal dan eksklusif, sementara TPT tetap menjadi determinan risiko yang harus dikendalikan melalui revitalisasi pasar tenaga kerja formal di daerah.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan PDRB per kapita secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan antarprovinsi di Indonesia selama periode 2021–2025, dengan ketiga variabel tersebut secara bersama-sama menjelaskan 86,5% variasi kemiskinan makro di 38 provinsi. TPT terbukti berpengaruh positif terhadap kemiskinan melalui jalur pendapatan, sementara IPM dan PDRB per kapita berpengaruh negatif, dengan IPM menunjukkan elastisitas reduksi kemiskinan yang paling besar dibandingkan kedua variabel lainnya. Temuan ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan makro di Indonesia sangat ditentukan oleh penguatan modal manusia sebagai instrumen utama, diikuti oleh revitalisasi pasar tenaga kerja guna menekan pengangguran terbuka, serta penciptaan kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan tidak semata bertumpu pada sektor padat modal dan ekstraktif.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan pemerintah daerah, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), untuk menerapkan kebijakan afirmatif anggaran pendidikan dan kesehatan guna mempercepat peningkatan IPM, mengingat modal manusia terbukti sebagai perisai struktural paling efektif dalam menekan kemiskinan. Pemerintah daerah juga disarankan menggeser orientasi kebijakan industri dari sektor padat modal dan ekstraktif menuju diversifikasi sektor padat karya berwawasan lokal, sehingga pertumbuhan ekonomi regional dapat menyerap tenaga kerja secara lebih luas dan berdampak langsung pada penurunan kemiskinan di akar rumput, alih-alih hanya meningkatkan agregat PDRB tanpa pemerataan. Selain itu, mengingat sektor informal pada periode 2021–2025 cenderung semakin jenuh dalam menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan formal, revitalisasi pasar tenaga kerja formal daerah dan perluasan skema perlindungan sosial bagi penganggur menjadi penting untuk mencegah transmisi kemiskinan baru. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel kelembagaan daerah dan efektivitas program perlindungan sosial spesifik yang belum tercakup dalam model ini, mengingat variabel-variabel tersebut turut menyumbang 13,5% variasi kemiskinan yang belum dijelaskan, serta

melakukan analisis lanjutan pada tingkat kabupaten/kota untuk menangkap heterogenitas yang lebih granular di dalam masing-masing provinsi.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada STISIP Syamsul Ulum, Sukabumi, atas dukungan yang diberikan selama penelitian ini berlangsung, serta kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia atas ketersediaan data resmi yang digunakan dalam penelitian ini.

6. DAFTAR RUJUKAN

- Alesina, A., & Perotti, R. (2020). Income distribution, political instability, and investment. *European Economic Review*, 121, 103-118.
- Arndt, C., Mahrt, K., & Tarp, F. (2020). Structural transformation, inequality, and poverty reduction in developing countries. *World Development*, 136, 105-122.
- Badan Pusat Statistik. (2021–2025). Laporan Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Jakarta: BPS RI.
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6th ed.). Springer Nature.
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. National Bureau of Economic Research.
- Bhagwati, J., & Panagariya, A. (2013). *Why Growth Matters: How Economic Growth in India Reduced Poverty and the Lessons for Other Developing Countries*. PublicAffairs.
- Dartanto, T., Moeis, F. R., & Otsuka, K. (2023). Shocks, vulnerability, and chronic poverty in Indonesia: New evidence from long-term longitudinal data. *Journal of Asian Economics*, 85, 101-115.
- Foster, J., Greer, J., & Thorbecke, E. (2010). The Foster–Greer–Thorbecke poverty measures: Twenty-five years later. *The Journal of Economic Inequality*, 8(4), 491-524. <https://doi.org/10.1007/s10888-010-9136-1>
- Fosu, A. K. (2023). Growth, inequality, and poverty reduction in developing countries: Recent global evidence. *Research in Economics*, 77(2), 154-167.
- Ivani, W. T., & Auwalin, I. (2024). Komposisi sektoral dan pertumbuhan ekonomi: Dampaknya terhadap tingkat kemiskinan perdesaan di 34 provinsi Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(2), 353–367. <https://doi.org/10.53088/jerps.v4i2.1077>
- Jonaidi, A. (2023). Analisis makroekonomi terhadap fenomena kemiskinan struktural regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 45-58.
- Pratamasyari, D. A., Pakawaru, I., Nuriatullah, Hidayah, N. R., & Amalia, R. (2025). The impact of Human Development Index on poverty rates in Indonesia: Panel data analysis of 34 provinces, 2015–2023. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 7(2), 372–388. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v7i2.358.372-388>

- Purnomo, S., Handoko, R., & Wibowo, A. (2024). Human capital development and poverty alleviation in Eastern Indonesia: A panel data analysis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 79-98.
- Suryahadi, A., Al Izzati, M., & Suryadarma, D. (2021). Estimating the impact of the COVID-19 pandemic on poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(1), 25-37.
- Wan, G., Hu, X., & Liu, W. (2023). Digital economy, human capital, and poverty reduction in Southeast Asia. *Journal of Asian Economics*, 88, 101-118.
- World Bank. (2025). *Indonesia poverty assessment: Pathways towards economic security*. World Bank. [World Bank – Indonesia Poverty Assessment](#)
- Widiyanto, A., & Setyadharma, A. (2025). Pertumbuhan ekonomi regional versus degradasi ekologi: Menguji kebenaran Pro-Poor Growth di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(1), 12-29.